

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP
KUALITAS PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE
PADA LAPORAN TAHUNAN
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar
dalam LQ-45)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

FERRY ADRIAWAN PRAMONO
NIM. C2C007042

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ferry Adriawan Pramono
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007042
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS
PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE
PADA LAPORAN TAHUNAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan
yang Terdaftar dalam LQ-45)

Dosen Pembimbing : Drs. Daljono, M.Si., Akt.

Semarang, 15 Juli 2011
Dosen Pembimbing.

(Drs. Daljono, M.Si., Akt.)
NIP.19640911993031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ferry Adriawan Pramono
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007042
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS
PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE
PADA LAPORAN TAHUNAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan
yang Terdaftar dalam LQ-45)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Juli 2011

Tim Penguji:

1. Drs. Daljono, M.Si, Akt (.....)
2. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Akt (.....)
3. Dul Muid, S.E, M.Si, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Ferry Adriawan Pramono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan *Corporate Governance* pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Juli 2011
Yang membuat pernyataan,

Ferry Adriawan Pramono
NIM. C2C007042

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of firm characteristics on the quality of corporate governance disclosures in annual report in Indonesia. Factors tested in this study are firm size, profitability, dispersed ownership level, leverage, and industry classification.

Collecting data is using purposive sampling method to the companies that listed in LQ-45 Indonesian Stock Exchange during 2009-2010. A total of 66 companies used as sample in this research. There are 93 disclosure items to detect quality of disclosure of corporate governance disclosure.

This research uses multiple regression that use to examine the influence of firm characteristics on the quality of corporate governance disclosures in annual report. The result of this research showed those independent variables that have significant influence on the quality of corporate governance disclosures is industry classification. However, firm size, profitability, dispersed ownership level, and leverage do not show significant influence on the quality of corporate governance disclosures.

Keywords: corporate governance, corporate governance disclosures, firm characteristics, annual report

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal, *leverage*, dan klasifikasi industri.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2010. Sebanyak 66 perusahaan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Terdapat 93 item pengungkapan untuk mendeteksi kualitas pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan regresi berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas pengungkapan pada laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance* adalah klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal, dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance*.

Kata kunci: *corporate governance*, pengungkapan *corporate governance*, karakteristik perusahaan, laporan tahunan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberi anugerah dan penyertaan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* PADA ANNUAL REPORT (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam LQ-45)”, dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Diponegoro Semarang.
3. Bapak Daljono, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing. Terima kasih untuk segala bimbingan dan waktu yang telah diberikan, hingga skripsi dapat diselesaikan.
4. Bapak Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali. Terima kasih untuk bimbingan yang diberikan.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi penyertaan dan kekuatan kepada penulis.
7. Bapak Agus Pramono, Ibu Tri Ariani Rachmawati, dan Mas Galih Adhi Pramono yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan doa kepada penulis.

8. Adityas “TY” Wicaksana, Adriant Yogi, Fredericus William, Setyo Slamet, Timotius Tarigan, dan Mirza Nirwanto. Terima kasih untuk semua yang telah kita alami, sahabat!
9. Keluarga Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi (PMKFE) Undip, Suryanto, Lidya, Devi, Anita (BPH 2010), yang sudah menjadi rekan dan keluarga dalam melayani-Nya.
10. Teman-teman LKM PMKP UNDIP telah memberikan arti penting dan cara menjadi seorang pemimpin.
11. Mas Abas, Binsar, Dewan, Mas Ivan, Mike, Ardy, Fendy, Wahyu, Nandana. Kakak, saudara, dan adik komcil yang selalu berbagi dan memberi kekuatan.
12. Tim RedaksiOK: Ruth, Debby, Yohan, Hessi, dan Surya. Terima kasih untuk pengalaman berharga dalam melayani-Nya membuat Magz-One.
13. Tim KKN Kec. Semarang Utara 2010: Mas Parno, Chika, Ayup, Warno, dan Habibie. Terima kasih telah bersama-sama mengukir kisah di KKN Semarang Utara.
14. Teman-teman kos Singosari Timur IIB/2: Mirza, Timo, Isnan, Hot, Mas Wisnu, Mas Indra, Maul, Mas Teguh, Mas Mizwar, Bang Ali, Mas Aji, Mas Gilbert, Rama, Bu Pri, Bu Djanto, dan Mas Dias. Terima kasih untuk pengalaman kehidupan dalam kos yang telah diberikan.
15. Teman-teman satu bimbingan: Nazila dan Rahmi. Terima kasih untuk kebersamaan selama proses bimbingan.
16. Kak Shandy dan Anthony yang telah memberikan solusi ditengah masalah yang dihadapi penulis.
17. Teman-teman Akuntansi Reguler 2007 FE UNDIP. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.
18. Pihak-pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis satu per satu sebutkan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharap saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan tulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 15 Juli 2011
Penulis,

Ferry Adriawan Pramono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	10
2.1.1 Teori Keagenan.....	10
2.1.2 Teori <i>Stakeholders</i>	13
2.1.3 Pengertian dan Prinsip <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.4 Fungsi-fungsi dan Pihak-pihak <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.5 Kualitas Pengungkapan CG dalam Laporan Tahunan	19
2.1.6 Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan CG.....	23
2.1.6.1 Ukuran Perusahaan.....	23
2.1.6.2 Profitabilitas.....	24
2.1.6.3 Tingkat Persebaran Modal.....	25
2.1.6.4 <i>Leverage</i>	26
2.1.6.5 Klasifikasi Industri	26
2.1.7 Penelitian Terdahulu	27
2.2 Kerangka Penelitian.....	30
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	31
2.3.1 Ukuran Perusahaan	31
2.3.2 Profitabilitas.....	32
2.3.3 Tingkat Persebaran Modal.....	33
2.3.4 <i>Leverage</i>	34
2.3.5 Klasifikasi Industri.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasi	36
3.1.1 Variabel Dependen.....	36

3.1.2 Variabel Independen	40
3.1.2.1 Ukuran Perusahaan.....	40
3.1.2.2 Profitabilitas.....	41
3.1.2.3 Tingkat Persebaran Modal.....	41
3.1.2.4 <i>Leverage</i>	42
3.1.2.5 Klasifikasi Industri	42
3.2 Populasi dan Sampel.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	44
3.5 Metode Analisis Data	44
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2 Analisis Regresi Berganda	44
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.5.3.1 Uji Multikolinearitas	45
3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas	46
3.5.3.3 Uji Normalitas.....	47
3.5.3.4 Uji Autokorelasi.....	47
3.5.4 Uji Hipotesis	48
3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	48
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	48
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	49
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	50
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	50
4.2 Analisis Data	51
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	53
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	55
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	57
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	58
4.2.3 Uji Hipotesis	60
4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	60
4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	61
4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	61
4.2.4 Pengujian Hasil Hipotesis	63
4.3 Interpretasi Hasil.....	65
4.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan CG .	65
4.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Pengungkapan CG	66
4.3.3 Pengaruh Tingkat Persebaran Modal terhadap Kualitas Pengungkapan CG.....	67
4.3.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kualitas Pengungkapan CG.....	68
4.3.5 Pengaruh Klasifikasi Industri terhadap Kualitas Pengungkapan CG .	69
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan.....	73
5.3 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Item Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	37
Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian	52
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov Smirnov</i>	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	54
Gambar 4.2 Grafik Normal Plot.....	54
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplot</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Daftar Perusahaan LQ45 yang Menjadi Sampel	79
LAMPIRAN B Data Sekunder Variabel-variabel Penelitian.....	81
LAMPIRAN C Hasil Statistik Deskriptif	84
LAMPIRAN D Uji Asumsi Klasik.....	85
LAMPIRAN E Hasil Uji Regresi Berganda	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus skandal korupsi dan penipuan akuntansi dalam laporan keuangan yang dilakukan beberapa perusahaan terkemuka di dunia seperti Enron, WorldCom, dan Parmalat telah menjadi perhatian semua pihak. Dampak dari skandal korupsi dan penipuan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat dan Eropa tersebut adalah adanya pemberhentian ribuan pekerja. Terlebih lagi, dampak yang paling utama adalah munculnya keraguan masyarakat atau pemangku kepentingan pada perusahaan dan institusi pendukungnya. Munculnya keraguan pemangku kepentingan kepada perusahaan dan institusi pendukungnya ini akan menimbulkan dampak yang luas, karena perusahaan akan sulit dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu, skandal korupsi dan penipuan akuntansi tersebut juga melibatkan salah satu kantor akuntan publik di Amerika Serikat, yaitu Arthur Andersen yang berperan dalam skandal penipuan laporan keuangan perusahaan Enron. Menurut Warsono *et al.* (2009) penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kegagalan organ-organ perusahaan tersebut melaksanakan fungsinya.

Setelah terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, beberapa lembaga pengatur kebijakan berusaha membuat berbagai regulasi yang berfungsi untuk mencegah peristiwa tersebut terulang. Hal ini dilakukan dengan cara melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan peristiwa tersebut,

dan yang paling utama adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya regulasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui kongres dengan membuat undang-undang yang diberi nama *Sarbanes Oxley Act of 2002*. Undang-undang ini berfungsi untuk menetapkan standar baru bagi dewan dan manajemen perusahaan dan juga kantor akuntan publik. Dari usaha-usaha yang telah dilakukan baik dari sektor pemerintah dan non-pemerintah, muncul wacana untuk menggunakan suatu alat atau sistem yang salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa organ-organ perusahaan berfungsi dengan baik. Hal tersebut mendorong timbulnya wacana mengenai *Corporate Governance (CG)*.

Isu CG sebenarnya telah ada sebelum kasus skandal korupsi dan penipuan perusahaan-perusahaan seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Namun dengan meningkatnya kompleksitas perusahaan dan bertambahnya tuntutan dari banyak pihak, CG berkembang menjadi isu yang lebih dikenal. Hal ini membuat perusahaan memperhatikan aspek-aspek dari CG dari sudut pandang yang lebih luas. CG juga telah menjadi isu yang mendominasi dalam pasar ekonomi yang berkembang selama beberapa dekade terakhir (Muhamad *et al.*, 2009).

Hashim (2009) dalam Muhamad *et al.* (2009) mendefinisikan CG sebagai kombinasi dari proses dan struktur yang dilakukan oleh dewan direksi untuk mengotorisasi, mengarahkan, dan mengawasi manajemen untuk menuju pencapaian dari tujuan perusahaan. Hal ini menggambarkan pentingnya CG dalam mengawal manajemen (yang diwakili oleh dewan direksi) dalam mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan aturan yang ada. Definisi CG menurut perspektif yang

berbeda disampaikan oleh Rezaee (2009) dalam Muhamad *et al.* (2009) yaitu proses yang terus-menerus dari pengelolaan, pengendalian, dan penilaian bisnis untuk menciptakan nilai pemegang saham (*shareholder*) dan melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Definisi di atas menggambarkan fungsi CG sebagai alat untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dan menghindarinya dari berbagai benturan kepentingan. Menurut Rezaee (2009) terdapat tujuh fungsi esensial dari CG, yaitu: pengawasan, manajerial, pemenuhan, audit internal, *advisory*, audit eksternal, dan pengawasan.

Di Indonesia, respon terhadap isu CG ditandai dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004. KNKG merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan *good governance* di Indonesia secara komprehensif dan memberikan masukan kepada pemerintahan tentang isu *governance* di sektor publik maupun privat (Warsono *et al.*, 2009). Pada tahun 2006, KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* walaupun pedoman tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada tahun 2000, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-MAC), *Indonesian Financial Executives Association* (IFEA), *Indonesian Netherlands Association* (INA), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

membentuk forum yang bernama *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). FCGI memiliki tujuan utama meningkatkan ketanggapan dan menyosialisasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) kepada komunitas bisnis Indonesia sehingga dapat memperoleh banyak manfaat dari terciptanya pengelolaan perusahaan yang sehat (Warsono *et al.*, 2009). Sedangkan pada tahun 2006, BAPEPAM mengeluarkan keputusan nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan dalam publik yang salah satu isinya menyatakan bahwa emiten harus menyertakan laporan mengenai Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Keputusan tersebut harus dipatuhi oleh semua emiten dan perusahaan publik karena terdapat kekuatan hukum dan juga menimbang bahwa laporan tahunan merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi.

Beberapa studi menyimpulkan dampak positif penggunaan CG dalam perusahaan. *Governance Metrics International* (2005) dalam Warsono *et al.* (2009) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan CG yang kurang efektif berpotensi lebih besar menerbitkan ulang laporan keuangan (*financial restatement*), dan cenderung tidak mematuhi reformasi CG. Brown dan Caylor (2004) dalam Warsono *et al.* (2009) mengungkapkan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *bad corporate governance*, perusahaan dengan *good corporate governance* (GCG) di era 1990-an menghasilkan laba yang lebih tinggi, memiliki risiko bisnis yang lebih rendah, dan memiliki *return* saham yang lebih tinggi. Gompers *et al.* (2003), dalam Warsono *et al.* (2009), menyimpulkan bahwa

kinerja perusahaan yang “*democracies*” mengungguli kinerja perusahaan yang “*dictatorships*” baik dalam ukuran profitabilitas maupun nilai perusahaan. Selain itu, pertumbuhan investasi di perusahaan yang demokratis lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan investasi perusahaan yang diktator. Perusahaan dikategorikan sebagai demokratis jika kekuasaan aktual atas perusahaan berada di para pemegang saham. Sebaliknya, perusahaan dikategorikan sebagai diktator jika kekuasaan aktual atas perusahaan berada di tangan manajemen. Sedangkan Newell dan Wilson (2002) dalam Warsono et al. (2009) menunjukkan bahwa investor di dunia membutuhkan standar yang tinggi terhadap CG, dan bersedia membayar lebih tinggi untuk saham-saham perusahaan yang dapat memenuhi kriteria yang diharapkan. Banyak literatur CG membahas arti pentingnya CG untuk pencapaian tujuan para pemangku kepentingan, tidak sekedar pencapaian tujuan para pemegang saham (McBarnet, 2005; Luo, 2007; Monks dan Minow, 2008; Anand, 2008 dalam Warsono et al., 2009). Dari uraian pentingnya CG dan dampak positif yang diberikan oleh CG, dapat diketahui bahwa fungsi CG adalah untuk menjadi alat perusahaan dalam optimalisasi fungsi dari organ-organ perusahaan khususnya dalam memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tidak hanya kepentingan perusahaan tersebut.

Dampak positif penggunaan CG dalam perusahaan yang telah diuraikan sebelumnya adalah pemangku kepentingan akan lebih menaruh perhatian atau lebih mempercayai perusahaan yang sudah mengimplementasikan CG dalam aktivitas bisnisnya. Langkah selanjutnya yang perlu diambil perusahaan agar pemangku kepentingan mengetahui bahwa perusahaan telah

mengimplementasikan CG adalah dengan mengungkapkan informasi CG. Salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi CG adalah melalui laporan tahunan (*annual report*). Laporan tahunan dapat menjadi perangkat utama perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan (Rini, 2010). Dalam Keputusan BAPEPAM LK nomor: KEP-134/BL/2006 laporan tahunan dianggap sebagai sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi. Penelitian tentang pengungkapan CG dalam laporan tahunan perusahaan merupakan topik yang banyak diteliti selama beberapa tahun terakhir.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi CG dilakukan oleh Maingot dan Zeghal (2008) yang menganalisis informasi CG pada sektor perbankan di Kanada. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan (yang diproksikan dengan asset) dengan luas pengungkapan CG. Muhamad *et al.* (2009) meneliti tentang kualitas pengungkapan isu *governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Malaysia menemukan bahwa hanya ukuran perusahaan, *leverage*, dan sektor industri yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan isu *governance*, sementara faktor-faktor lain seperti komposisi komite audit, komposisi dewan direksi, profitabilitas, dan status auditor tidak memiliki pengaruh signifikan. Aljifri dan Hussainey (2007) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan perusahaan di Uni Emirat Arab. Faktor-faktor yang diteliti antara lain, sektor industri, ukuran perusahaan, *debt ratio*, profitabilitas, dan ukuran auditor. Dari hasil penelitian

tersebut Aljifri dan Hussainey (2007) menemukan bahwa hanya *debt ratio* dan profitabilitas yang mempengaruhi secara signifikan luas laporan informasi *forward-looking*, sedangkan faktor-faktor yang lain tidak mempengaruhi secara signifikan

Di Indonesia penelitian mengenai pengungkapan CG dilakukan oleh Sayogo (2006) yang meneliti tentang determinan pengungkapan CG melalui internet pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Jakarta. Sayogo (2006) menemukan bahwa hanya dua dari lima variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CG yaitu ukuran perusahaan (yang diproksikan dengan total aset) dan jumlah dewan independen, sedangkan profitabilitas, persebaran saham, dan ukuran perusahaan (yang diproksikan dengan harga saham) tidak berpengaruh secara signifikan. Rini (2010) yang meneliti tentang luas pengungkapan CG dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia menyatakan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan CG. Sedangkan Safitri (2008) meneliti tentang pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan CG dan menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CG. Ketiga penelitian di atas tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2007) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap tingkat CG yang disajikan.

Saat ini, perusahaan dituntut untuk memberikan kualitas laporan informasi CG yang dapat mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan yang ada dalam perusahaan. Dalam praktiknya, kualitas laporan informasi CG dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Namun saat ini faktor yang menjadi fokus dalam penelitian pengungkapan CG adalah karakteristik perusahaan. Berkembangnya praktik penerapan CG dan semakin ketatnya aturan/regulasi pengungkapan CG di Indonesia serta berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis mencoba meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas pengungkapan CG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdapat dalam LQ-45. Penulis menetapkan perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam LQ-45 sebagai sampel penelitian karena LQ-45 merupakan kumpulan saham teraktif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga para investor menaruh perhatian lebih terhadap perusahaan-perusahaan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Corporate Governance pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CG dan berdasarkan latar belakang di atas, dalam skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*?
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*?

3. Apakah tingkat persebaran modal perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*?
4. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*?
5. Apakah klasifikasi industri berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*.
2. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*.
3. Pengaruh tingkat persebaran modal (*dispersed ownership level*) terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*.
4. Pengaruh *leverage* perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*.
5. Pengaruh klasifikasi industri terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menumbuhkan kesadaran penerapan dan pengungkapan CG bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi bagi investor.
3. Menambah studi literatur tentang kualitas pengungkapan CG dan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisis tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel dependen, independen, serta variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang deskripsi operasional penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi obyektif dan analisis data, serta beberapa pengujian yang dilakukan sebelum menganalisis data, antara lain uji normalitas data dan uji autokorelasi.

Bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan dan saran-saran penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan

Salah satu teori yang mendasari penelitian tentang kualitas pengungkapan informasi CG adalah Teori Keagenan (*agency theory*). Menurut Mallin (2003) dalam Muhamad *et al.* (2009) CG dapat dipandang dari *agency perspective*. Hubungan keagenan pertama kali dieksplorasi oleh Rose (1973), kemudian dipaparkan secara teoritis oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Solomon (2007). Lebih lanjut, definisi hubungan agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Tan (2003) adalah

“...a contract relationship which one or more person (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa teori keagenan merupakan sebuah hubungan kontrak antara satu atau lebih pihak (*principal*) terhadap pihak lain (*agen*) untuk melakukan jasa atas nama mereka (*principal*) yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada agen. Dari pengertian di atas, Jensen dan Meckling menyebut manajer perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai *principal* (Warsono *et al.*, 2009). Kemudian Warsono *et al.* (2009)

dan Tan (2003) menyatakan bahwa pemegang saham (*principal*) mendelegasikan wewenangnya untuk mengambil keputusan bisnis kepada manajer (*agen*), yang merupakan perwakilan dari pemegang saham. Tetapi dalam pelaksanaan hubungan tersebut terdapat kepentingan ekonomis yang dapat membuat *agen* tidak dapat selalu membuat keputusan bisnis yang sesuai dengan kepentingan *principal* (Warsono *et al.*, 2009 dan Elqorni, 2009).

Asumsi utama teori keagenan adalah *principal* dan *agen* mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri dalam menjalankan hubungan kontrak tersebut, dan seringkali kepentingan dan tujuan tersebut berbeda. Perbedaan kepentingan dan tujuan tersebut dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan (*agen*) cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya, misalnya mendapatkan insentif, sedangkan *principal* menginginkan hasil kinerja perusahaan yang meningkat sehingga mereka mendapatkan *return* atas investasi yang mereka buat. Hal ini dapat juga disebut konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan ini dapat disebabkan dan menyebabkan asimetri informasi antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*). Asimetri informasi adalah keadaan dimana suatu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding pihak lainnya.

Salah satu cara untuk mengurangi perbedaan kepentingan dan asimetri informasi adalah dengan melakukan penerapan dan pengungkapan terkait isu CG. Dengan penerapan CG, diharapkan perusahaan, sebagai *agen*, dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham sebagai *principal* (Warsono *et al.*, 2009) sehingga konflik kepentingan

antara *agen* dan *principal* dapat diminimalkan. Untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan CG sebagai wujud komitmennya terhadap pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham, perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan informasi CG. Dengan pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan perusahaan, khususnya yang terkait dengan isu CG, diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan (*agen*) dan pemegang saham (*principal*).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* merupakan teori yang banyak dipakai oleh para peneliti terkait dengan isu CG karena mampu menjelaskan hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Warsono *et al.* (2009) menyatakan bahwa saat ini telah banyak penelitian mengenai CG yang mendasarkan gagasan-gagasannya melalui teori *stakeholder* ini.

Friedman (1962) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa tujuan utama pemegang saham adalah memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemegang saham dianggap sebagai satu-satunya pemangku kepentingan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir pandangan tentang istilah pemangku kepentingan telah berubah. Freeman (1983) dalam Chariri dan Ghozali (2007) memperluas pandangan tentang istilah pemangku kepentingan dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak. Istilah “pemangku kepentingan” (*stakeholders*) yang diungkapkan oleh Freeman (1983) dalam Chariri dan Ghozali (2007) selaras dengan istilah pemngku kepentingan

yang diungkapkan Warsono *et al* (2009). menurut Warsono *et al.* (2009) pemangku kepentingan atau *stakeholders* adalah:

“pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, dan operasi suatu organisasi. Pemangku kepentingan perusahaan dapat meliputi pelanggan, karyawan, pemegang saham, media, pemerintah, asosiasi profesi dan asosiasi perdagangan, aktivis social dan lingkungan, dan organisasi-organisasi non-pemerintah.”

Dari istilah di atas dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang signifikan dalam aktivitas bisnis perusahaan.

Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa tujuan perusahaan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan itu sendiri namun melayani tujuan publik yang lebih luas, yaitu menciptakan nilai bagi masyarakat (Warsono *et al.*, 2009; Chariri dan Ghozali, 2007). Teori *stakeholder* juga dapat dipahami sebagai teori yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini berarti bahwa para pemangku kepentingan mempunyai suatu hubungan dalam aktivitas bisnis perusahaan dan juga mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan bisnis perusahaan. Namun demikian dalam praktiknya, setiap pemangku kepentingan mempunyai pengaruh, kepentingan, dan hubungan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya dalam suatu aktivitas bisnis, perusahaan dituntut untuk memberikan produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun di sisi yang lain perusahaan harus mencari sumber daya yang efisien, efektif, dan ekonomis pada suatu pemasok (*supplier*). Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan dan keterampilan perusahaan dalam mengelola perbedaan tersebut sehingga tujuan utama perusahaan untuk melayani tujuan publik yang lebih luas (*stakeholder*) dapat

tercapai. Ullman (1985) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antar perusahaan dengan *stakeholdernya*. Lebih lanjut, Ullman (1985) cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk mengelola para pemangku kepentingan tergantung kepada strategi yang diadopsi perusahaan.

Penerapan dan pengungkapan CG merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mencapai tujuan para pemangku kepentingan. CG memberikan panduan bagi perusahaan untuk dapat memaksimalkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab organ-organ perusahaan sehingga tujuan para pemangku kepentingan dapat tercapai. Sedangkan pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan perusahaan khususnya terkait dengan isu CG dapat memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan telah melakukan aktivitas dalam rangka pemenuhan tujuan para pemangku kepentingan. Pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan perusahaan juga dapat digunakan sebagai media pendukung bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan.

2.1.3 Pengertian dan Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Solomon (2007) istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Report* pada tahun 1992. *Cadbury Report* dianggap sebagai titik tolak praktik CG di seluruh dunia. Tiga area utama yang menjadi perhatian komite *Cadbury*, yaitu *Board of Directors (BoD)*, audit, dan pemegang saham (Warsono *et al.*, 2009). Di Inggris, *Cadbury Report* ini menjadi landasan dibentuknya komite untuk penyusunan pedoman praktik CG lainnya, yaitu,

Greenbury Committee, Hampel Committee, Turnbull Committee, dan Higgs Committee. Sampai saat ini belum ada definisi tunggal atas CG (Solomon, 2007 dan Warsono *et al.*, 2009). Dalam setiap definisi yang dikemukakan terdapat perbedaan yang substansial berdasarkan negara dimana CG dipraktikan. Menurut Solomon (2007) definisi-definisi yang ada terkait CG dapat dikelompokkan menjadi dua perspektif, yaitu perspektif konvensional dan perspektif kontemporer. Dalam perspektif konvensional hubungan yang terdapat dalam CG hanya sebatas hubungan antara perusahaan dan pemiliknya (pemegang saham). Sedangkan dalam perspektif kontemporer hubungan yang terdapat dalam CG tidak hanya antara perusahaan dengan pemiliknya, tetapi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Definisi CG menurut *Cadbury Report* (1992) adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Definisi ini mendeskripsikan peran dasar (*basic role*) dari CG. Lebih lanjut, definisi mengenai CG secara lebih spesifik dikemukakan oleh Parkinson (1994) dalam Salomon (2007) yang mengungkapkan bahwa CG adalah proses supervisi dan pengendalian yang bermaksud untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan selaras dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham. Definisi yang diungkapkan oleh Parkinson (1994) dalam Salomon (2007) ini berfokus pada hubungan antara manajemen perusahaan dan para pemegang saham. Definisi CG yang mencakup area yang lebih luas diungkapkan oleh Tricker (1984) dalam Salomon (2007) yang mengungkapkan:

“... the governance role is not concerned with the running of the business of the company *per se*, but with giving overall direction to enterprise, with overseeing and controlling the executive actions on management and with

satisfying legitimate expectations of accountability and regulation by interests beyond the corporate boundaries.”

Sedangkan Canon (1994) dalam Salomon (2007) mengungkapkan definisi CG yang dilihat berdasarkan peraturan yang dibuat (*regulation-centred*) yaitu:

“... the governance of an enterprise is the sum of those activities that make up the internal regulation of the business in compliance with the obligation placed on the firm by legislation, ownership, and control. It incorporates the trusteeship of assets, their management and their deployment.”

Dari definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa CG adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk memastikan bahwa aktivitas dan tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan menyejahterakan para pemangku kepentingan, tidak semata-mata mencapai tujuan perusahaan itu sendiri.

Selain merumuskan definisi CG, entitas CG juga mengembangkan asas-asas atau prinsip-prinsip CG. OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) mengembangkan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan.
4. Keterbukaan dan transparansi.
5. Akuntabilitas dewan komisaris.

Sedangkan di Indonesia KNKG (2006) menetapkan lima asas CG yang tercantum dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance*.

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.4 Fungsi-fungsi dan pihak-pihak *Corporate Governance*

Warsono *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa dalam memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip berterima umum, maka fungsi-fungsi CG yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan harus dilaksanakan. Fungsi-fungsi dan pihak-pihak yang terkait praktik CG adalah:

1. *Oversight* (perhatian secara bertanggung jawab) oleh *Board of Directors* (Dewan Direksi).
2. *Enforcement* (penegakan) oleh *Chief Executive Officers* (Pejabat Eksekutif).
3. *Advisory* (pemberian saran) oleh *Boards of Commissions/Committees* (Dewan Komisaris/Komite)
4. *Assurance* (penjaminan) oleh *Auditors* (Pemeriksa).
5. *Monitoring* (pemantauan) oleh *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan)

2.1.5 Kualitas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan

Tahunan

Praktik pengungkapan akuntansi di Indonesia mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI). PSAK yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan adalah PSAK No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAK No. 1 par 12 menyatakan bahwa:

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan laporan keuangan, penyajian laporan tambahan juga diperlukan untuk membuat keputusan yang wajar dan relevan, termasuk informasi tentang CG.

Saat ini praktik pengungkapan laporan keuangan dan laporan tahunan telah berkembang. Solomon (2007) menyatakan bahwa pengungkapan sangat penting untuk fungsi pasar modal yang efisien. Istilah pengungkapan mengacu kepada susunan dari bentuk informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti laporan tahunan, yang terdiri atas *item* wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Perkembangan pengungkapan dalam perkembangan transparansi adalah salah satu tujuan yang paling penting dalam reformasi CG di seluruh dunia (OECD, 1999 dalam Solomon, 2007).

Dari perspektif teori keagenan, asimetri informasi merupakan keadaan dimana perusahaan mengetahui pengetahuan lebih luas tentang aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan investor yang sudah ada maupun investor potensial. Keadaan ini juga berlaku dalam teori *stakeholder* dimana informasi yang tidak memadai dialami oleh semua pemangku

kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Tanpa sebuah sistem yang terstruktur dari pengungkapan dan dalam pelaporan keuangan dalam bagian khusus, akan sangat sulit bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dapat diandalkan, dan asimetri informasi yang terjadi akan menyebabkan *moral hazard* dan masalah *adverse selection* (Solomon, 2007). Dengan menerbitkan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan, khususnya mengenai CG, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya akan dapat memantau kinerja perusahaan dan mengambil keputusan secara lebih baik

Laporan tahunan adalah salah satu media yang digunakan perusahaan untuk dapat membagi informasi kepada para pemangku kepentingan. Dalam laporan tahunan terdapat dua komponen, yaitu laporan keuangan dan informasi tambahan. Untuk perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan perusahaan publik, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan keputusan nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menetapkan kepada seluruh emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku berakhir. BAPEPAM-LK menimbang bahwa laporan emiten merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi. Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan

manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam ketentuan tersebut, salah satu *item* yang harus dimuat adalah informasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dalam peraturan ini, terdapat sepuluh subbagian informasi mengenai CG diantaranya: informasi mengenai unsur-unsur pelaksana CG, sistem pengendalian internal, penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, tanggung jawab sosial, perkara penting yang sedang dihadapi perusahaan, dan tempat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan. Selain mengacu kepada peraturan BAPEPAM-LK, dalam praktik pengungkapan informasi CG perusahaan juga mengacu kepada Pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006.

Arti kata “kualitas” pada istilah “kualitas pengungkapan” menggambarkan luasnya atau banyaknya informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan terkait dengan CG baik berupa pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Tuntutan dari pemangku kepentingan mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi tentang CG dalam laporan tahunan. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi CG membuat perusahaan harus mengungkapkan informasi CG yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga akan mempengaruhi kualitas pengungkapan CG suatu perusahaan.

2.1.6 Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Kualitas

Pengungkapan *Corporate Governance*

Dalam praktik penerapan dan pengungkapan CG, karakteristik perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan CG. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan CG dalam laporan tahunan.

2.1.6.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan aktiva, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, dan lain sebagainya. Menurut McNally, Eng, dan Hasseldine (1982) dalam Muhamad *et al.* (2009) ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang dominan dalam praktik pengungkapan oleh karena tekanan yang dialami perusahaan baik dari dalam maupun dari luar. Sedangkan Singhvi dan Desai (1971) dalam Muhamad *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar menggunakan informasi-informasi yang ada untuk tujuan manajerial, khususnya untuk pengungkapan internal pengawasan oleh manajemen puncak. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan kualitas pengungkapan dinyatakan oleh beberapa penelitian. Maingot dan Zeghal (2008) dalam penelitiannya mengenai analisis pengungkapan informasi CG oleh bank-bank di Kanada menyatakan bahwa bahwa bank-bank dengan ukuran yang besar menjadi pokok perhatian atau objek yang dapat diteliti lebih bagi investor, salah satunya mengenai CG. Maingot dan Zeghal (2008) juga menyatakan bahwa bank

yang berukuran lebih besar mempunyai anggaran lebih banyak untuk hubungan investor dan mereka dapat menyediakan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan laporan tahunan mereka. Dari pendapat dan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula kuantitas dan ragam pemangku-pemangku kepentingan yang terkait, sehingga perusahaan perlu untuk menyediakan kualitas pengungkapan yang lebih luas agar dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

2.1.6.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau *profit*. Dalam pengaruhnya terhadap praktik pengungkapan, Muhamad *et al.* (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih besar dibanding dengan yang lainnya memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut. Lebih lanjut, Singhvi dan Desai (1971) mendukung pendapat Muhamad *et al.* (2009) dengan menyatakan pendapatan yang lebih besar memotivasi manajemen untuk menyediakan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk memberikan jaminan kepada investor. Selain itu, profitabilitas perusahaan yang meningkat juga dapat berasal dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Semakin bertambahnya sumber pendanaan yang didapat dari pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan akan semakin mempunyai kesempatan dalam mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung dapat meningkatkan labanya. Seiring dengan meningkatnya kapasitas atau sumber

pendanaan perusahaan, maka jumlah dan ragam pemangku kepentingan akan semakin banyak. Hal ini mengakibatkan pengungkapan informasi yang mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Pengungkapan informasi ini digunakan sebagai respon tanggung jawab perusahaan atas penggunaan dana pemangku kepentingan. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bujaki dan McConomy (2002) dalam Maingot dan Zeghal (2008) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami penurunan laba memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan mereka terkait isu CG. Pengungkapan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya investor terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan menggunakan ROE (Return on Equity), yang merupakan perbandingan laba setelah pajak dengan total ekuitas.

2.1.6.3 Tingkat Persebaran Modal (*Dispersed Ownership Level*)

Tingkat persebaran modal suatu perusahaan mengidentifikasi apakah suatu perusahaan memiliki persebaran modal yang terpusat (*centered*) atau tersebar (*dispersed*). Perusahaan yang memiliki tingkat persebaran modal yang tersebar memiliki investor dalam kuantitas dan ragam yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat persebaran modal yang terpusat. Dalam hubungannya dengan praktik pengungkapan, perusahaan dengan tingkat persebaran tersebar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat persebaran yang terpusat karena harus memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan yang terdiversifikasi.

2.1.6.4 Leverage

Leverage atau *debt ratio* adalah variabel yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu untuk menguji determinan dari pengungkapan perusahaan. Rasio leverage menunjukkan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi (Endrian, 2010). Dalam hubungannya dengan praktik pengungkapan, Jensen dan Meckling (1976) dalam Aljifri dan Hussainey (2007) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih luas karena perusahaan dengan leverage yang tinggi mengakibatkan timbulnya biaya pengawasan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan perusahaan tersebut mengurangi biaya pengawasan dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan kreditur-kreditur.

Banyak ukuran yang digunakan untuk mewakili tingkat leverage suatu perusahaan, yaitu *debt to asset*, *long term debt to total equity*, *debt to equity*, dan *debt service coverage*. Dalam penelitian ini, tingkat leverage yang digunakan adalah *debt to equity ratio*, yang menunjukkan seberapa besar total ekuitas yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pembiayaan hutang (Endrian, 2010).

2.1.6.5 Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri sebagai determinan dalam praktik pengungkapan CG telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Wallace *et al.* (1994) dalam Alsaheed (2006) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan cenderung berbeda antara satu sektor industri dengan sektor-sektor

lainnya. Hal ini karena masing-masing sektor memiliki karakteristik yang unik satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut Sayogo (2006) menyatakan bahwa kanggotaan sebuah perusahaan dalam suatu sektor industri akan mempengaruhi struktur politik perusahaan tersebut, yang pada akhirnya perusahaan-perusahaan pada sektor industri yang sama akan memiliki pola pengungkapan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap sektor industri memiliki pola pengungkapan yang berbeda, karena masing-masing sektor industri memiliki keunikan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi CG pada laporan tahunan atau media lain, seperti internet, pada perusahaan. Muhamad *et al.* (2009) meneliti kualitas pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Malaysia. Dalam penelitiannya, Muhamad *et al.* (2009) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan CG, yaitu proporsi direktur non-eksekutif independen dalam komite audit, presentase *outside directors* dalam dewan direksi, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, status auditor, dan sektor industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya tiga variabel, yaitu leverage, ukuran perusahaan, dan sektor industri yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG pada perusahaan.

Maingot dan Zeghal (2009) meneliti tentang analisis pengungkapan informasi *corporate governance* oleh Bank-bank di Kanada. Dalam penelitiannya, Maingot dan Zeghal mengambil sampel bank-bank yang ada di Kanada karena

bank-bank tersebut memiliki peran penting dalam kondisi perekonomian di Kanada dan memiliki peraturan yang ketat. Media yang digunakan untuk objek penelitian adalah *web site* perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan informasi CG.

Selanjutnya, Sayogo (2006) meneliti tentang determinan-determinan dari pengungkapan CG melalui internet pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta. Dalam penelitiannya, Sayogo (2006) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penungkapan CG, yaitu profitabilitas, jumlah dewan independen, tingkat persebaran modal, ukuran perusahaan, dan harga saham. Penelitian Sayogo (2006) mengambil sampel perusahaan yang tergolong dalam Liquid 45 (LQ-45) Bursa Efek Jakarta, yaitu perusahaan yang sahamnya paling aktif diperdagangkan dalam bursa. Media yang menjadi objek penelitian adalah *website* perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan jumlah dewan independen memiliki pengaruh signifikan.

Lebih lanjut, Aljifri dan Hussainey (2007) meneliti determinan-determinan dari informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Uni Emirat Arab. Dalam penelitiannya, Aljifri dan Hussainey (2007) mendefinisikan pengungkapan informasi *forward-looking* sebagai informasi yang terkait dengan rencana saat ini dan peramalan masa depan yang memungkinkan investor dan pengguna lain untuk menilai kinerja keuangan masa depan perusahaan. Dalam penelitiannya, Aljifri dan Hussainey mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi *forward-looking*, yaitu, sektor industri, ukuran perusahaan, *debt ratio*, profitabilitas, dan ukuran auditor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *debt ratio* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Uni Emirat Arab.

Berikut ini ditampilkan tabel ringkasan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Variabel Independen	Pengukuran	Hasil Penelitian
2009	Muhamad <i>et al.</i>	Jumlah AC Independen	Proporsi AC independen dibanding seluruh jumlah AC	(1) Leverage, ukuran perusahaan, dan sektor industri berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG.
		Proporsi outside director	Presentase outside director dalam dewan	
		Eksistensi AC	Keberadaan AC	
		Ukuran Perusahaan	Total asset	
		Profitabilitas	<i>Net profit margin</i>	
		<i>Leverage</i>	<i>Total debt to equity ratio</i>	
		Status Auditor	<i>Big four</i> dan <i>non-big four</i>	
2008	Maingot dan Zeghal	Ukuran Perusahaan	Total Aset	(1) Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dengan kualitas pengungkapan CG
2006	Sayogo	Ukuran Perusahaan	Total Aset	(1) Ukuran perusahaan dan jumlah dewan independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG dalam media website perusahaan
		Profitabilitas	Return on Equity	
		Klasifikasi Industri	Agrikultur, pertambangan, industri lain-lain, <i>consumer goods</i> , keuangan, perdagangan, jasa dan investasi, property, real estate dan konstruksi	
		Jumlah Dewan Independen	Presentase Jumlah Dewan Independen	
		Dualitas Posisi	Dualitas posisi dan non-dualitas posisi	
		Persebaran Saham	Presentase mayoritas dibandingkan presentase minoritas	
2007	Aljifri dan Hussainey	Sektor Industri	Perbankan, asuransi, industri, dan perusahaan jasa	(1) profitabilitas dan <i>debt ratio</i> memiliki

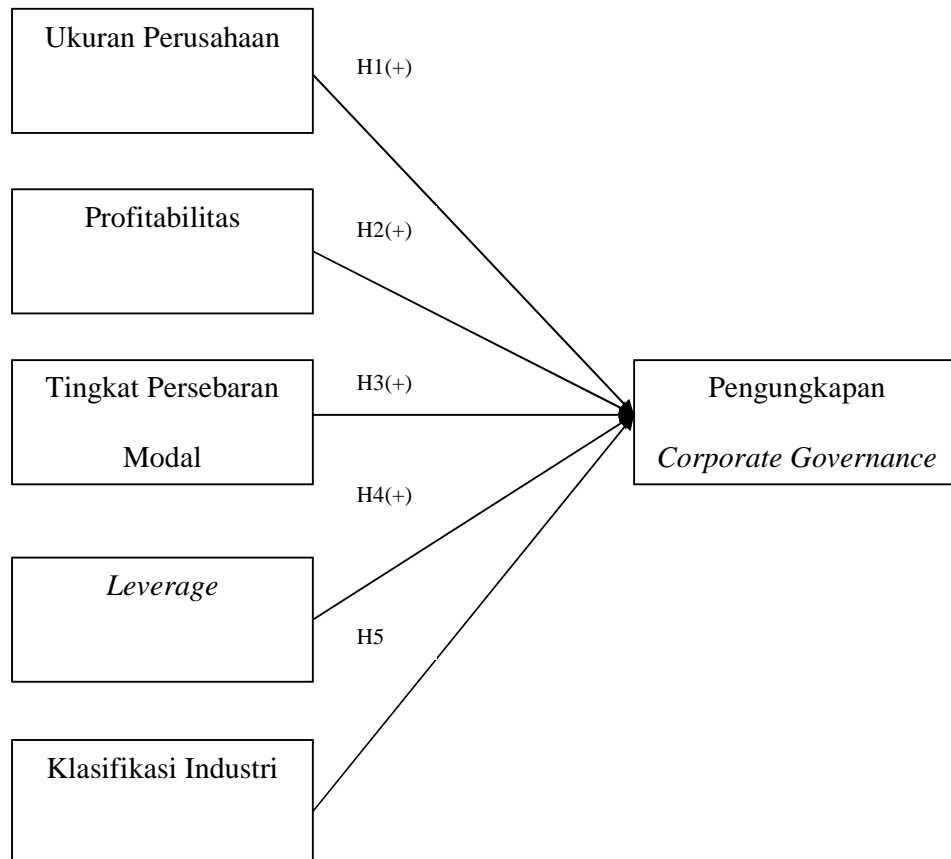
	Ukuran Perusahaan	Natural log dari total penjualan	pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi <i>forward-looking</i>
	<i>Debt ratio</i>	<i>Debt to total asset</i>	
	Profitabilitas	Laba bersih dibagi penjualan bersih	
	Ukuran Auditor	<i>Big four</i> dan <i>non-big four</i>	

2.2 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam karakteristik perusahaan yang mempengaruhi kualitas pengungkapan CG, maka kerangka penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Ukuran Perusahaan

Perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan para pemangku kepentingan. Hubungan yang lebih kompleks ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah, jenis, dan tuntutan pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya kompleksitas tersebut, maka perusahaan berusaha menyediakan informasi-informasi yang relevan. Selanjutnya, sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa setiap keputusan, kepentingan, dan aktivitas bisnis perusahaan dipengaruhi sekaligus mempengaruhi pemangku kepentingan, maka perusahaan yang memiliki hubungan lebih kompleks akan mempunyai tuntutan yang lebih besar. Untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan tersebut, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi CG dengan kualitas yang tinggi. Selain hal tersebut, peningkatan tingkat pengungkapan perusahaan akan mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi (Sayogo, 2006).

Beberapa penelitian (Zeghal dan Maingot, 2002; Sayogo, 2006; dan Safitri, 2008) menunjukkan hasil yang positif antara ukuran perusahaan, yang diprosikan dengan total asset perusahaan, dengan tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan dengan kualitas pengungkapan informasi *Corporate Governance*

2.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Muhamad *et al.* (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut.

Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan ditandai dengan meningkatnya jumlah dan ragam pemangku kepentingan yang mempercayakan sebagian hartanya untuk disertakan dalam modal perusahaan. Bertambahnya sumber pendanaan ini akan memacu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan cenderung naik.

Pada praktiknya, peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan pengungkapan informasi, khususnya informasi mengenai CG sebagai respon tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan oleh perusahaan. Dengan laporan informasi CG yang memiliki kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh

oleh manajemen. Cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, tidak hanya berdasarkan kepentingan perusahaan saja. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat pengungkapan laporan informasi *Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh positif profitabilitas dengan kualitas pengungkapan informasi *Corporate Governance*

2.3.3 Tingkat Persebaran Modal

Jenis perusahaan dibagi menjadi dua berdasarkan struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar (*dispersed ownership*) dan kepemilikan terpusat (*centralized ownership*). Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan tersebar cenderung memiliki pemangku kepentingan dengan jumlah lebih besar dan memiliki tingkat keragaman yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang memiliki struktur terpusat. Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi, khususnya informasi CG, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi CG lebih luas. Dengan demikian perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan tersebar cenderung akan menyediakan pengungkapan informasi CG lebih luas atau menghasilkan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terpusat

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh positif tingkat persebaran kepemilikan dengan kualitas informasi *Corporate Governance*

2.3.4 Leverage

Endrian (2010) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi. Muhamad *et al.* (2009) menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi, khususnya informasi keuangan dalam rangka untuk meyakinkan kreditur jangka panjang perusahaan bahwa perusahaan mempunyai sumber daya yang cukup untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Aljifri dan Hussainey (2007) mengungkapkan bahwa karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menyebabkan biaya pengawasan (*monitoring costs*) yang lebih tinggi, maka perusahaan berusaha mengurangi biaya tersebut dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan kreditur. Dari pendapat para peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan cenderung menungkapkan lebih banyak informasi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Terdapat pengaruh positif tingkat *leverage* perusahaan dengan kualitas pengungkapan informasi *Corporate Governance*

2.3.5 Klasifikasi Industri

Wallace *et al.* (1994) dalam Alsaeed (2006) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan memiliki kecenderungan berbeda antara industri yang berbeda pula, hal ini menggambarkan keunikan karakteristik yang mereka miliki. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Aljifri dan Hussainey (2007) yang menyatakan bahwa sektor-sektor industri yang ada akan mengadopsi kebijakan, pengukuran, dan penilaian akuntansi serta teknik pengungkapan yang berbeda dan hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam tingkat pengungkapan. Sektor industri yang berbeda juga menyebabkan perbedaan ragam dan jumlah pemangku kepentingan, sehingga perusahaan akan cenderung memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan kualitas pengungkapan antar sektor industri yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Terdapat pengaruh klasifikasi industri perusahaan dengan kualitas pengungkapan informasi *Corporate Governance*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasi

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan CG yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CG dalam laporan tahunan ini diukur dengan indeks pengungkapan CG perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia (BEI).

Metode yang digunakan untuk mengukur indeks yang telah dibentuk tersebut adalah dengan mengaplikasikan indeks tidak tertimbang dengan menggunakan nilai dikotomis, yaitu nilai 1 untuk setiap *item* yang diungkapkan serta 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan (Rini, 2010). Tabel pengungkapan yang digunakan untuk mengukur indeks pengungkapan CG dikembangkan oleh Kusumawati (2008) dalam Safitri (2008) yang bersumber dari Keputusan BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006 dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (KNKG, 2006). Tabel pengungkapan tersebut terdiri dari 16 klasifikasi yang kemudian dibagi lagi menjadi 93 item.

Indeks pengungkapan CG pada laporan tahunan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Bhuiyan dan Biswan, 2007 dalam Rini, 2010):

$$IPCG = \frac{\text{Jumlah skor item pengungkapan CG yang diungkapkan}}{\text{Skor maksimum item pengungkapan CG}} \quad (3.1)$$

Tabel 3.1 Item Pengungkapan *Corporate Governance*

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1.	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham. 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. 3. Tanggal pelaksanaan RUPS. 4. Hasil RUPS
2.	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Dewan Komisaris. 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). 3. Latar belakang pendidikan dan karier Dewan Komisaris 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 5. Kebijakan dan jumlah remunirasi anggota Dewan Komisaris. 6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. 7. Jumlah rapat yang dihadiri. 8. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. 9. Mekanisme pengambilan keputusan. 10. Program pelatihan Dewan Komisaris.
3.	Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi. 3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota Direksi. 4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 5. Mekanisme pengambilan wewenang. 6. Mekanisme pendelegasian wewenang. 7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi 8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi 9. Jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat 10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi

		11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi
4.	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Audit. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 4. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 5. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit. 7. Independensi anggota Komite Audit. 8. Keberadaan piagam Komite Audit.
5.	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
6.	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. 5. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko. 7. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko.
7.	Komite Tata Kelola Perusahaan (GCG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite GCG. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite GCG. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite

		<p>GCG.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite GCG. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite GCG. 7. Independensi anggota GCG.
8.	Komite-komite lain yang Dimiliki oleh Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite. 7. Independensi anggota komite.
9.	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Sekretaris Perusahaan. 2. Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan. 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.
10.	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal). 2. Jumlah anggota SPI. 3. Jabatan masing-masing anggota SPI. 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI. 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun. 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan.
11.	Manajemen Risiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko tersebut.
12.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Posisi kasus. 3. Status penyelesaian perkara/gugatan. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.

	dewan komisaris.	
13.	Akses informasi dan data perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. 2. Daftar penyebaran informasi ke publik.
14.	Etika Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan
15.	Pernyataan Penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG. 4. Keberadaan Board Manual. 5. Struktur tata kelola perusahaan. 6. Hasil penerapan GCG selama setahun. 7. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor.
16.	Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan. 2. Misi perusahaan. 3. Nilai-nilai perusahaan. 4. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya. 5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. 6. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan. 7. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan

Sumber:

1. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006
2. Pedoman Umum Corporate Governance (KNKG, 2006)
3. Kusumawati (2006) dalam Safitri (2008)

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang diprosikan dengan total aset

perusahaan menggambarkan kekayaan perusahaan. Beberapa penelitian mengenai pengungkapan CG dalam laporan penilitan menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh secara signifikan dengan kualitas pengungkapan CG (Muhamad et al., 2009; Maingot dan Zeghal, 2008; dan Sayogo, 2006). Total aset perusahaan kemudian diubah dalam bentuk natural log agar data yang didapat tidak terlalu besar.

3.1.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan ROE (*Return on Equity*). Aljifri dan Hussainey (2007) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pengungkapan dalam laporan tahunan. ROE merupakan proporsi laba bersih terhadap total ekuitas.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (3.2)$$

3.1.2.3 Tingkat Persebaran Modal

Tingkat persebaran modal (*dispersed ownership level*) menggambarkan besarnya jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor individu. Investor individu adalah investor yang memiliki saham diluar pemerintah, institusi domestik dan luar negeri, serta kelompok yang masih memiliki hubungan keluarga (Alsaeed, 2006). Tingkat persebaran modal diukur dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh investor individu dalam suatu perusahaan.

3.1.2.4 Tingkat Leverage

Tingkat leverage pada penelitian ini diukur dengan *debt to equity ratio*. Muhamad et al. (2009) menemukan bahwa tingkat leverage yang diukur dengan *debt to equity ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengungkapan CG. *Debt to equity ratio* merupakan proporsi total hutang terhadap total ekuitas.

$$\text{Debt to equity} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}} \quad (3.3)$$

3.1.2.5 Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri yang dipakai dalam penelitian menggunakan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang termuat dalam *Fact Book* yang terbagi dalam 9 sektor industri. Klasifikasi industri menurut Bursa Efek Indonesia adalah:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Industri dasar dan kimia
4. Aneka industri
5. Industri barang konsumsi
6. *Property dan real estate*
7. Infrastruktur, utilitas, dan transportasi
8. Keuangan
9. Perdagangan dan jasa investasi

Identifikasi klasifikasi industri menggunakan variabel *dummy*, yaitu 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam jenis industri yang dimaksud dan 0 untuk perusahaan yang tidak termasuk dalam industri yang dimaksud.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia yang dirilis pada bulan Februari

2010. Jumlah populasi sampel tersebut adalah 45 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahun 2009 dan atau 2010,
2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dalam bentuk bahasa Indonesia dan atau selain bahasa Indonesia pada tahun 2009 dan atau 2010, dan menyajikan laporan informasi *Corporate Governance* pada laporan tahunan tersebut, dan
3. Perusahaan yang mengalami keuntungan pada tahun 2009 dan atau 2010.

Karena waktu yang dimiliki terbatas, maka penulis menetapkan batas waktu pengumpulan data, yaitu 3 Juni 2011. Setiap data sampel yang tidak memenuhi kriteria sampai batas waktu yang ditentukan, maka sampel tersebut dikeluarkan dari sampel penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45. Sumber data yang akan digunakan merupakan data publikasi yang berupa laporan LQ-45, laporan tahunan, dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data tersebut diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Diponegoro, *Indonesian Capital Market Directory*, dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen dan data-data merupakan laporan LQ-45, laporan tahunan, laporan keuangan yang diperoleh dari Pojok BEI Universitas Diponegoro, *Indonesian Capital Market Directory*, dan website BEI www.idx.co.id.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik memberikan informasi umum mengenai data yang akan diuji dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal, *leverage*, dan klasifikasi industri terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance* adalah regresi berganda. Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap kualitas pengungkapan *Corporate Governance* dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IPCG} &= \alpha_0 + \beta_1 \text{LNASET} + \beta_2 \text{ROE} + \beta_3 \text{DISP} + \beta_4 \text{DER} + \beta_5 \text{DTMB} + \beta_6 \text{DINK} + \beta_7 \text{DANI} \\ &+ \beta_8 \text{DKON} + \beta_9 \text{DPRE} + \beta_{10} \text{DIUT} + \beta_{11} \text{DKEU} + \beta_{12} \text{DJAI} + \varepsilon \end{aligned} \quad (3.4)$$

Keterangan:

IPCG	: Indeks Pengungkapan Corporate Governance
α	: Konstanta
β	: Koefisien regresi
LNASET	: Ukuran Perusahaan
ROE	: Profitabilitas
DISP	: Tingkat persebaran modal
DER	: Tingkat <i>leverage</i>
DTMB	: Pertambangan
DINK	: Industri Dasar dan Kimia
DANI	: Aneka Industri
DKON	: Industri Barang Konsumsi
DPRE	: <i>Property dan Real Estate</i>
DIUT	: Investasi, Utilitas, dan Transportasi
DKEU	: Keuangan
DJAI	: Perdagangan, Jasa, dan Analisis
ε	: <i>Error term</i>

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghozali (2006) cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Selain menggunakan nilai *tolerance* dan VIF, cara yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat multikolinearitas

adalah dengan melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen. Jika tingkat korelasi masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius.

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Kemudian Ghozali (2006) menyatakan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas. Cara pertama adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Dasar untuk menganalisis grafik plot adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara yang kedua untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan Uji Park. Cara bekerja Uji Park adalah dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006). Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas.

3.5.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analistik grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

2. Analisis Statistik

Uji yang digunakan adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample K-S) adalah apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan dalam uji autokorelasi adalah uji Lagrange Multiplier (LM test), yang

akan menghasilkan Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-Godfrey (BG test) dilakukan dengan meregres variabel pengganggu (residual) ut menggunakan autogresive model. Dalam hasil output analisis SPSS, jika koefisien parameter untuk residual lag 2 (lag_2) memberikan probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi.

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam praktiknya, ukuran yang digunakan untuk menilai koefisien determinasi adalah nilai Adjusted R^2 . Tidak seperti nilai R^2 yang dapat menimbulkan bias, nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikan. Jika nilai probabilitas signifikan ≤ 0.05 maka hipotesis

tidak dapat ditolak. Ini berarti secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi ≤ 0.05 maka hipotesis tidak dapat ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.